

KERJASAMA SIPIL-MILITER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI KASUS TANGGAP DARURAT BANJIR JAKARTA 2013, 2014, 2015)

DR. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si, APU¹, Suprpto, S.Si., M.Si (Han)²,
Tika Savitri Pandanwangi, S.Si., M.Si (Han)³
Kapusdatinmas BNPB & Dosen Universitas Pertahanan¹
Statistisi BNPB² Pegawai Sekretariat ASEAN³

sutopopn2001@gmail.com

Abstract

Flood is one of potential hazards led to disaster in DKI Jakarta Province. The flood almost occurs every year due to rainfall and water distribution from upper areas such as Bogor and Depok. During Jakarta flood in 2013, 2014, and 2015, emergency response optimized roles of military and civil. Military conducts its roles and functions in disaster as part of Military Operation Besides War or Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Civil-military coordination is a mechanism in disaster management in term of accelerating response and minimizing number of victim and damage as well. In 2013, the Governor appointed the Secretary of DKI Jakarta Province as the Incident Commander and Military High Official of Kasdam Jaya as the Vice Incident Commander. In 2014 and 2015, flood still occurred but involvement of the military was not larger than in 2013 and the Governor did not issue a status of emergency response.

Keywords : *Flood, Coordination, OMSP.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana dewasa ini sudah menjadi ancaman yang nyata bagi bangsa dan negara Indonesia. Tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, letusan Gunung Merapi 2010, tsunami Mentawai 2010 dan lain sebagainya menunjukkan bahwa wilayah Indonesia tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman bencana. Begitu juga dengan wilayah DKI Jakarta, yang hampir setiap tahun mengalami bencana banjir. Salah satu faktor penyebab banjir yang terjadi di wilayah Bogor, Depok dan Jakarta adalah tingginya intensitas curah hujan yang berdampak pada tingginya muka air pada pintu air Katulampa, pintu air Depok, dan pintu air Manggarai yang bermuara ke laut melalui kali Ciliwung yang

melintasi Jakarta. Terbatasnya kapasitas pintu air menyebabkan meluapnya air yang kemudian mengalir ke Jakarta dalam waktu 11 sampai 13 jam. Bahkan pada Januari 2013 banjir menggenangi 31 kecamatan, 74 kelurahan, dan 337 RW yang tersebar di lima wilayah Jakarta dengan ketinggian antara 20 cm hingga 200 cm.

Penanggulangan banjir Jakarta tidak hanya melibatkan dinas ataupun relawan terkait, melainkan juga melibatkan pasukan TNI. Semenjak tahun 1990 dalam kejadian bencana, militer dan sipil telah beroperasi secara simultan dan terdapat saat di mana militer dan sipil mempunyai hubungan kerjasama yang sangat dekat (Rietjens dan Bollen, 2008). Bencana tidak hanya menjadi urusan sipil saja, melainkan perlu adanya keterlibatan dari pihak militer. Koordinasi sipil-militer terbukti mampu untuk mempercepat penanganan bencana

sehingga jumlah korban dan kerusakan dapat diminimalisir. Dalam makalah Metcalfe dan Hanyson (2012) yang berjudul *"Trends and Challenges in Humanitarian Civil-Military Coordination, a review of the literature"* dijelaskan bahwa definisi *Civil-Military Coordination* (CMCoord) atau koordinasi sipil-militer menurut *United Nations* berarti dialog penting antara aktor sipil dan militer dalam bidang kemanusiaan untuk melindungi dan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghindari persaingan, meminimalkan ketidak-konsistenan, dan mencapai tujuan bersama. Definisi serupa juga digunakan oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) dan *Inter-Agency Standing Committee* (IASC).

Dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan banyak terjadi interaksi antara militer (TNI) dengan otoritas sipil (BNPB/BPBD), pemerintah daerah, masyarakat sipil lainnya seperti swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik dalam masa prabencana, bencana, maupun pasca bencana (Nugroho, 2012). BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentunya memiliki keterbatasan dalam melakukan *emergency response*, maka diperlukan sebuah koordinasi dan perencanaan program *emergency response* yang terpadu antara pihak sipil dan militer pada saat tanggap darurat, baik dalam koridor Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) maupun pengerahan pasukan dan kerjasama sipil-militer di luar daripada SKTD tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengerahan pasukan skala besar, maka TNI dirasa lebih cepat dibandingkan dengan sipil. Kecepatan dalam memberikan bantuan kepada korban bencana memungkinkan untuk menekan jumlah korban meninggal.

Banjir Jakarta yang terjadi pada tahun 2013, 2014, dan 2015 dalam penanganannya telah melibatkan sipil dan militer terutama pada masa tanggap

darurat. Pengerahan sumber daya baik sipil maupun militer dimaksimalkan baik dari segi sumber daya manusia maupun peralatan penanggulangan bencana. Permasalahan yang dihadapi dalam pelibatan militer adalah belum adanya prosedur yang tetap. Di tingkat pusat maupun tingkat daerah, prosedur dan mekanisme perbantuan kekuatan TNI dalam menangani bencana alam masih menjadi permasalahan birokrasi yang kontra produktif bagi penanganan akibat bencana secara cepat dan tepat. Di sisi lain, partisipasi kalangan sipil dalam penanggulangan bencana kerap dihadapkan pada keterbatasan kemampuan maupun sarana dan prasarana yang dimiliki (Soepandji, 2013). Menurut penelitian Panjaitan (2008) dalam Hidayat (2013) dalam kasus Gempa Nias, ada indikasi bahwa salah satu kendala TNI dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang) meliputi antara lain: belum cukupnya legislasi yang mencakup peran TNI terutama dalam hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, *Standard Operating Procedure* (SOP) koordinasi dengan elemen sipil pada masa tanggap darurat, dan aturan tentang batasan waktu pendampingan yang kesemuanya itu berakibat pada kurang jelasnya koordinasi masing-masing elemen pada saat penanganan bencana di lapangan.

Bencana dalam perspektif ketahanan nasional, menunjukkan bahwa ancaman ini harus dihadapi dengan segala potensi nasional yang ada. Dalam makalah yang berjudul *Penguatan Identitas TNI melalui Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana*, Hidayat (2013) menjelaskan pandangan Rukavishnikov (2006) bahwa perkembangan terakhir terkait hubungan sipil-militer ini mengarah kepada harapan akan adanya perubahan pada posisi dan status militer dalam masyarakat, yaitu perubahan dari militer yang bersifat dependent/mono menuju yang bersifat professional dan multifungsional. Dalam keadaan damai maka militer dapat menjalankan kegiatan OMSP seperti

membantu dalam penanggulangan bencana.

Tidak semua pelaksanaan koordinasi sipil militer berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adanya perbedaan dalam sistem komando menyebabkan terkadang terjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana sistem koordinasi dan kerjasama sipil-militer antara teori *Civil-Military Coordination* dengan keadaan sebenarnya dalam tanggap darurat banjir Jakarta 2013, 2014, dan 2015?

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan sistem koordinasi dan kerjasama sipil-militer pada tanggap darurat banjir Jakarta 2013, 2014, 2015 serta menemukan bentuk optimal dari kerjasama dan koordinasi sipil-militer pada tanggap darurat.

2. METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011). Dalam hal ini data primer didapatkan dari hasil wawancara mendalam, teknik wawancara digunakan karena sebagian data terdapat dalam benak informan (Irawan, 2007) yang dalam hal ini aktor kunci dari pelaksanaan koordinasi sipil-militer pada tanggap banjir Jakarta 2013, 2014, 2015. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, sebagai contoh lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2011). Data sekunder merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan, data diperoleh dari sumber terbuka seperti buku-buku, internet, jurnal, dan berbagai sumber literatur dari instansi yang diteliti.

2.2. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di DKI Jakarta. Lokasi penelitian terletak di instansi pemerintah (BNPB & BPBD DKI Jakarta) serta satuan-satuan militer di Jakarta yang bertugas pada tanggap darurat banjir Jakarta 2013, 2014, dan 2015.

2.3. Pengumpulan dan Analisa Data

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis berdasarkan teori *Civil-Military Coordination* dari IASC pada studi kasus tanggap darurat banjir Jakarta 2013, 2014, 2015. Metode deskriptif juga digunakan untuk mengkaji data sesuai apa adanya (Irawan, 2007). Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung kepada obyek penelitian, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian-penelitian terhadap dokumen dan literatur yang didapatkan selama penelitian berlangsung dan berkaitan dengan obyek penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara induktif agar dapat menemukan pengaruh yang mempertajam hubungan-hubungan. Penelitian induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari 'keadaan umum', tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya (Moleong, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Banjir Jakarta

Banjir Jakarta merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di ibukota, namun yang membedakan adalah luas wilayah terdampaknya. Rencana kontijensi banjir 2015 yang disusun oleh BPBD DKI Jakarta menyebutkan bahwa wilayah

Provinsi DKI Jakarta dilewati 13 Sungai dan 70 kawasan rawan banjir, meliputi 37 kecamatan, 125 Kelurahan, dan 634 RW. Sejarah banjir Jakarta pernah terjadi pada tahun 1621, 1654, 1918, 1976, 1996, 2002, 2007, dan tahun 2013. Menurut Khomarudin et.al (2014) jika dilihat dari masalah banjir di DKI Jakarta, terdapat tiga masalah yang dapat menjadi penyebab banjir. Pertama adalah karena debit sungai dari daerah hulu mengalir ke DKI Jakarta. Kedua adalah curah hujan lokal yang melanda DKI Jakarta dalam beberapa hari dan tanah sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan. Ketiga adalah banjir rob dari laut yang biasanya melanda di Jakarta bagian utara.

Permasalahan banjir di DKI Jakarta sebenarnya bukan merupakan masalah yang baru. Sejak zaman kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman pada abad ke-5 banjir sudah menggenangi wilayah Jakarta. Pada saat Jakarta diambil alih oleh Pemerintahan Hindia Belanda di mana Jakarta masih bernama Batavia, pada tahun 1621 banjir juga melanda dengan begitu dahsyatnya. Zaenuddin (2013) menjelaskan bahwa ambisi besar petinggi VOC untuk menyulap Batavia seperti kota-kota di Eropa khususnya Belanda kandas karena kondisi geografis, keadaan alamnya, dan iklim tropis yang tidak memungkinkan. Tahun 1654 bencana banjir besar kembali melanda, yang menyebabkan aliran sungai Ciliwung menjadi keruh dan tidak dapat digunakan lagi untuk mandi, mencuci, dan minum. Pada saat itu banjir menggenangi wilayah Batavia berlangsung hingga beberapa hari. Hal ini menyebabkan semua perekonomian dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Demikian pula yang terjadi pada tahun 1654, 1918, 1976, 1996, 2002, dan 2007. Hingga sampai saat ini banjir besar di Jakarta terkenal dengan siklus 5 dan 10 tahunan.

Banjir 2013 adalah banjir besar yang terjadi pada tahun 2013 yang menggenangi 508 RW di 124 kelurahan di DKI Jakarta. Banjir ini menjadikan 83.930 orang mengungsi selama beberapa hari dan 38

orang meninggal dunia. Pada tanggal 17 Januari 2013, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengumumkan status darurat banjir untuk Jakarta. Kerugian akibat banjir ini ditaksir lebih dari 20 triliun rupiah.

Pada tahun 2014 dan 2015 banjir juga masih terjadi di wilayah DKI Jakarta namun dalam skala yang lebih kecil. Tahun 2014 banjir menerjang DKI Jakarta terjadi sebanyak 3 kali dengan rentang waktu sekitar 3 minggu. Pada tanggal 12 Januari 2014 curah hujan maksimum tercatat pada pos hujan Tanjung Priok (91 mm/hari) dan tanggal 13 Januari pada pos hujan Lebak Bulus (128 mm/hari). Berdasarkan pencatatan dari BNPB, 25 orang meninggal akibat banjir ini dan ribuan orang harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Puncak pengungsi pada banjir Jakarta 2014 terjadi pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 12.00 WIB. Jumlah pengungsi mencapai 80.600 jiwa yang tersebar pada 297 lokasi pengungsian. Pengungsi terbanyak berada di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan (25.319 jiwa dan 24.847 jiwa).

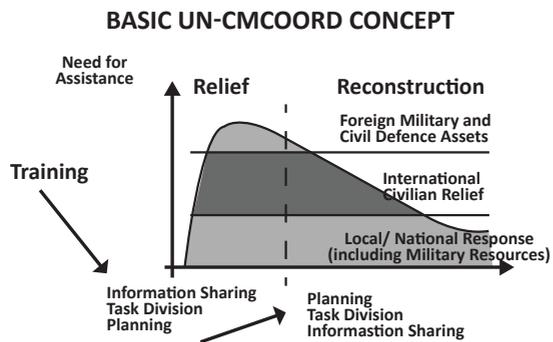
BPBD DKI Jakarta mencatat pada Senin (9-2-2015) pukul 16.00 WIB, ada 93 titik genangan di Jakarta. Banjir tersebar di 35 titik di Jakarta Pusat, 28 titik di Jakarta Barat, 17 titik di Jakarta Utara, 8 titik di Jakarta Timur, dan 5 titik di Jakarta Selatan. Kurang lebih 13 ribu lebih masyarakat Jakarta terdampak banjir di 126 RT/221 RW. Jumlah pengungsi yang tertinggi tercatat berada di Jakarta Utara yaitu 3.255 jiwa yang tersebar di 59 tempat pengungsian. Banjir telah menyebabkan 5 orang meninggal dunia yang tersebar di Jakarta Pusat (1 orang), Jakarta Timur (1 orang), dan Jakarta Utara (3 orang).

3.2 Koordinasi Sipil Militer dalam Penanggulangan Banjir

Penanggulangan bencana sekarang ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sipil saja melainkan sudah menjadi bagian dari tugas militer. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dewasa ini menjalankan dua tugas

yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dalam keadaan darurat dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam keadaan aman. Menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa salah satu tugas dalam OMSP adalah penanggulangan bencana. TNI dapat diterjunkan untuk mempercepat penanganan ketika terjadi bencana.

Perbedaan budaya kerja antara sipil dan militer membuat koordinasi antara keduanya kadang menimbulkan beberapa persoalan. Tujuan, cara kerja serta penggunaan bahasa dalam melaksanakan kegiatan cenderung berbeda antara sipil dan militer. Dalam melakukan tugas kemanusiaan seperti bencana, perlu adanya koordinasi yang jelas agar pelaksanaan di lapangan tidak mengalami kendala.



Gambar 1. Konsep dan Hubungan Dasar UN-CMCoord (Sumber: *United Nations Civil-Military Coordination Officer Field Handbook* hal. 12).

United Nations (UN) pada gambar 1 menjelaskan bahwa penggunaan opsi militer merupakan opsi terakhir jika tenaga sipil tidak cukup kemampuan untuk penanganan bencana. Sedangkan, dalam *OSLO Guidelines* menjelaskan bahwa militer merupakan sebuah alat yang melengkapi mekanisme penanggulangan bencana. Sehingga keberadaan TNI akan mengisi kekurangan kebutuhan dalam masa darurat bencana. Konsep kerjasama sipil militer merupakan bagian untuk mengimplementasikan hubungan sipil

dan militer yang terjadi di lapangan, di mana posisi militer mengisi kesenjangan dari kemampuan sipil (Franke, 2006). Dalam perkembangannya, untuk merespon bencana, kekuatan TNI sangat diperlukan karena kesiapan dan jumlah personil yang cukup besar terutama dalam masa tanggap darurat bencana.

Dalam keadaan damai, kerjasama (*cooperation*) antara sipil-militer menjadi sangat dekat, salah satunya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan terkait dengan kerjasama antar keduanya. Namun, pada waktu menghadapi situasi *complex emergency* dibentuk *liaison* atau penghubung, baik dari pihak sipil maupun militer. Proses koordinasi telah diadaptasi dari model Rietjens (2008). Terdapat 3 tahapan dalam koordinasi; tahap pertama yaitu pembentukan, tahap kedua yaitu operasional di lapangan, tahap ketiga yaitu evaluasi yang merupakan fase akhir dari sebuah koordinasi. Pembentukan struktur organisasi dalam koordinasi sipil-militer dibutuhkan untuk melihat siapa melakukan apa dan sebagai kontrol dalam pencapaian tujuan.

Banjir Jakarta yang terjadi pada tahun 2013, 2014, dan 2015 tidak terlepas dari peran serta sipil-militer dalam penanganannya. Pengerahan pasukan TNI dilakukan setelah ada permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta menetapkan status darurat bencana banjir diiringi dengan pembentukan Komando Tanggap Darurat melalui keputusan Gubernur nomor 25/2013. Masa tanggap darurat bencana banjir ditetapkan selama 10 hari (17-27 Januari 2013). Pembentukan komando ini bertujuan untuk menyelaraskan penanganan karena melibatkan kekuatan sipil dan militer. Komando ini memiliki fungsi untuk menyelaraskan koordinasi sipil-militer agar penanggulangan banjir Jakarta dapat segera teratasi dan menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Kekuatan militer/TNI dalam masa darurat bencana bukan merupakan utama tetapi

sebagai kekuatan pembantu, sehingga jumlah personil yang diterjunkan dalam masa tanggap darurat sangat tergantung dari permintaan pemerintah DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan darurat bencana pemerintah DKI Jakarta mengamanatkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI.

Komando tanggap darurat bencana dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai komandan komando tanggap darurat dan Kasdam Jaya sebagai wakil komando. Susunan ini memperlihatkan koordinasi yang baik diharapkan mampu terwujud dengan komposisi pejabat tinggi yang saling melengkapi. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas baik dari kalangan sipil maupun militer. TNI yang terlibat dalam tanggap darurat ini tergabung dalam Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (Satgas PRC PB) yang dikomandoi oleh Kodam Jaya.

Pelibatan TNI dalam bencana sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 mengenai tugas pokok TNI yang salah satunya adalah pelaksanaan OMSP. Tahun 2013 TNI yang terlibat berjumlah 6.024 personil yang berasal dari matra darat, laut, dan udara, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 tidak sebanyak itu karena skala bencana yang tidak terlalu besar dan pemerintah DKI Jakarta tidak sampai mengeluarkan status darurat bencana.

Pengerahan personil militer pada tahun 2014 berdasarkan kebutuhan pada 23 titik prioritas penanggulangan banjir. Kebutuhan personil saat itu berjumlah 92 orang untuk melakukan berbagai tugas. Beberapa tugas TNI saat itu adalah mengontrol keluar masuk barang, menampung keluhan/kebutuhan masyarakat, mengordinasikan lurah/camat, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas posko. Sejumlah 18 kompi personil TNI AD membantu penanganan banjir, yang semuanya berasal dari Kodam Jaya. Untuk membantu sarana evakuasi dikerahkan 15 perahu karet dan 18 truk, (Palagan, 2014). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada

tanggal 13 Januari 2014 mengeluarkan surat keputusan Nomor 70 tahun 2014 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir berlaku hingga 11 Februari 2014. Walaupun tidak sampai mengeluarkan status darurat banjir, namun pelibatan militer/TNI sudah ada sejak ditetapkannya status siaga darurat.

Pada tahun 2015 pengerahan pasukan TNI yang terlibat dalam Satuan Reaksi Cepat (SRC), berikut ini jumlah pasukan yang disiagakan pada sesuai dengan tahapan bencana.

- a. Siaga darurat 10-19 Januari 2015: 120 berasal dari SRC
- b. Tanggap darurat 20-26 Januari 2015: 595 (120 SRC, 475 Satuan Tempur TNI)
- c. Transisi darurat ke pemulihan (27 Jan-8 Feb 2015): 120 berasal dari SRC

Personil yang tergabung dalam SRC PB disebar ke 22 titik posko banjir, yaitu 2 posko di Jakarta Pusat, 7 posko di Jakarta Barat, 3 di Jakarta Selatan, 5 di Jakarta Utara, dan 5 di Jakarta Timur. Dalam perkembangan selanjutnya, BNPB melalui Panglima TNI membutuhkan dukungan personil tambahan untuk banjir Jakarta sebanyak 450 personil. Tambahan pasukan ini berasal dari 100 orang Armabar TNI-AL, 100 orang Paskhas TNI-AU, 150 orang Kostrad TNI-AD, dan 100 orang Kopasus TNI-AD. Tambahan pasukan berfungsi untuk memperkuat personil yang telah lebih dahulu berada di lapangan.

Pelaksanaan penanggulangan banjir Jakarta merupakan bagian dari sinergitas antara sipil dan militer. Keterlibatan SKPD, BNPB, Basarnas, TNI, Polri dan lain sebagainya membutuhkan komando yang jelas dan terencana. Setiap pelaksanaan di lapangan harus dilakukan secara terarah dan dilakukan evaluasi setiap harinya. Sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan oleh Rietjens (2008), tahapan kedua yaitu operasional lapangan, semua rapat koordinasi dan pembagian pekerjaan dilaksanakan di posko utama sekaligus

sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di hari berikutnya. Pada masa tanggap darurat rapat diadakan pada sore hari setiap harinya. Rapat evaluasi ini bertujuan untuk melihat capaian yang telah dihasilkan oleh masing-masing pelaku dan menentukan prioritas serta kegiatan pada esok harinya. Rapat evaluasi memberikan kesempatan kepada semua unsur untuk memberikan hasil dan kendala yang mungkin ada di lapangan.

Luasnya wilayah yang terdampak bencana banjir juga merupakan kendala dalam melakukan koordinasi di lapangan. Seperti banjir 2013, karena luasnya wilayah yang tergenang dan banyaknya organisasi yang terlibat dalam upaya darurat menjadi kendala tersendiri. TNI yang berasal dari beberapa kesatuan dan organisasi sipil yang juga berbeda-beda, ketika di lapangan mengalami beberapa kesulitan dalam hal kerja sama karena perbedaan gaya komunikasi dan instruksi. Banyaknya organisasi masyarakat yang terlibat dalam banjir Jakarta dan pasukan militer yang berasal dari beberapa kesatuan, ketika di lapangan tidak bisa menerima perintah kecuali dari pimpinan mereka langsung. Dalam hal ini peran komandan komando tanggap darurat sangat penting untuk menyalurkan koordinasi di lapangan.

Syaifudin (2013) menyebutkan bahwa tidak terjalin koordinasi yang baik antara elemen pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan (*triple helix*) menyebabkan tumpang tindih bantuan dengan tidak meratanya proses distribusi bantuan di wilayah - wilayah yang terkena banjir di DKI Jakarta dan terlantarnya masyarakat yang menjadi korban bencana banjir.

4. KESIMPULAN

Koordinasi sipil militer dalam penanggulangan bencana sekarang ini menjadi bagian yang sangat penting. Koordinasi ini menempatkan militer sebagai kekuatan pendukung sehingga pengerahan

pasukan sangat tergantung pada permintaan dari pemerintah setempat. Militer dalam masa damai menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang salah satunya adalah penanggulangan bencana. Sesuai dengan OSLO *guideline* menyebutkan bahwa keterlibatan militer dalam penanggulangan bencana merupakan langkah untuk mengisi celah/gap yang tidak dimiliki oleh kemampuan sipil.

Banjir Jakarta yang terjadi pada tahun 2013, 2014, dan 2015 menunjukkan bahwa koordinasi antara sipil dan militer dalam bencana dapat berjalan baik. Pengerahan pasukan militer dalam penanganan banjir merupakan bagian untuk mempercepat upaya tanggap darurat agar tidak timbul korban dan kerusakan yang lebih banyak. Koordinasi ini dapat dilihat juga dalam penetapan sistem komando tanggap darurat 2013 dengan menempatkan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai komando dan Kasdam Jaya sebagai wakil komando. Dalam melakukan koordinasi di lapangan evaluasi kegiatan dilakukan setiap hari pada sore hari selama masa tanggap darurat. Evaluasi berguna untuk mengukur semua kegiatan yang telah dikerjakan baik oleh sipil maupun militer dan merencanakan kegiatan yang dilakukan pada hari berikutnya.

Perbedaan komando dan tata bahasa yang digunakan dalam sipil dan militer sedikit banyak memberikan kendala dalam operasi darurat di lapangan. Banyaknya organisasi masyarakat yang terlibat dalam banjir Jakarta dan pasukan militer yang berasal dari beberapa kesatuan, ketika di lapangan tidak bisa menerima perintah kecuali dari pimpinan mereka langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Franke, V. 2006. The Peacebuilding Dilemma: Civil-Military Cooperation In Stability Operations. Autumn: International Journal of Peace Studies 11.

- Hidayat, Nurul. 2013. Penguatan Identitas TNI melalui kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana.
- Irawan, Prasetya. 2007. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: DIA Fisip UI.
- Khomarudin, M. K. , Suwarsono., Ambarwati. D.O., dan Prabowo. G. 2014. Evaluasi Kejadian Banjir Kampung Pulo Dki Jakarta Dan Analisis Pengurangan Risikonya Berbasis Data *Unmanned Air Vehicle* (Uav) Dan Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Jakarta: LAPAN
- Metcalfe, Victoria dan Simon Haysom. 2012. Trends and Challenges Humanitarian Civil-Military Coordination: A review of the literature. UK: Humanitarian Policy Group.
- Moleong, Lexy J., 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Sundoro A. 2012. Analisis Kerjasama Sipil-Militer Dalam Bantuan Kemanusiaan Indonesia (Studi Kasus Masa Tanggap darurat Penanggulangan Bencana Alam Letusan G. Merapi 2010). Universitas Pertahanan Indonesia: Sekolah Kajian Pertahanan dan Strategis Program Studi Manajemen Pertahanan.
- Rietjens, Sebastian J.H. dan Myriame T.I.B. Bollen.2008.Managing Civil-Military Cooperation: A 24/7 Joint Effort for Stability. England: Ashgate Publishing Limited.
- Rietjens, S.J.H., 2008, Civil-Military Cooperation in Response to a Complex Emergency: Just Another Drill? Leiden, Netherland: Koninklijke Brill NV.
- Soepandji, Budi S. 2013.Ketangguhan Bangsa Terhadap Risiko Bencana dalam Perspektif Ketahanan Nasional.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Syaifudin. 2013. Relasi *Triple Helix* Pada Penanggulangan Bencana Banjir di DKI Jakarta (Studi Kasus Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Banjir DKI Jakarta Awal Tahun 2013). Jakarta.
- Redaksi Palagan. 2014. TNI AD Bantu Korban Banjir. Jakarta: Volume 15 No. 1 Edisi Maret 2014.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta.